

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Alamat: Jl. H. M. SAID NO. 27 MEDAN | Nomor Telepon: 061-4527254
Website: diskominfo.sumutprov.go.id | E-mail: diskominfo@sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154

Telepon: (061) 415046 - 4524309. Faksimile: (061) 4150194

Pos-el: inspektorat@sumutprov.go.id Laman: inspektorat.sumutprov.go.id.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 10 APRIL 2025

INSPEKTUR,

SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.SP., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690610 199703 1 005

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan,

2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA



D. ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196701191988031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan	6
1.4 Dasar Hukum.....	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja.....	18
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	19
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	25
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	28

3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	29
3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	30
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	38
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	39
B.	Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV		46
PENUTUP		46
LAMPIRAN		49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	10
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024	14
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	28
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	29
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	30
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 LKJIP yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara :

Komposisi Pegawai Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2024 :

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan

No		Jabatan	Jumlah
1		Jabatan Struktural	11
		Eselon II (Kepala Dinas)	1
		Eselon III (Kepala Bidang/Sekretaris	5
		Eselon IV	2
2		Jabatan Fungsional Analisis kebijakan Ahli Muda	4

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e / Pembina Utama	-
2	IV-d / Pembina Utama Madya	-
3	IV-c / Pembina Utama Muda	1
4	IV-b / Pembina Tk. I	4
5	IV-a / Pembina	4
6	III-d / Penata Tk. I	25
7	III-c / Penata	3
8	III-b / Penata Muda Tk. I	15
9	III-a / Penata Muda	1
10	II-d / Pengatur Tk. I	9
11	II-c / Pengatur	
12	II-b / Pengatur Muda Tk. I	1
13	II-a / Pengatur Muda	
	J u m l a h	63

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1	IV-e	-	-
2	IV-d	-	-
3	IV-c	1	-
4	IV-b	2	2
5	IV-a	2	2
6	III-d	13	12
7	III-c	3	-
8	III-b	7	8
9	III-a	1	
10	II-d	6	3
11	II-c	-	-
12	II-b	1	-
13	II-a	-	-
	Jumlah	36	27

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hirarkis disusun struktur organisasi kelembagaan Dinas Kominfo Provsu terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik Sektoral
6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan pemerintahan bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Aplikasi Informatika, bidang Statistik Sektoral, bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

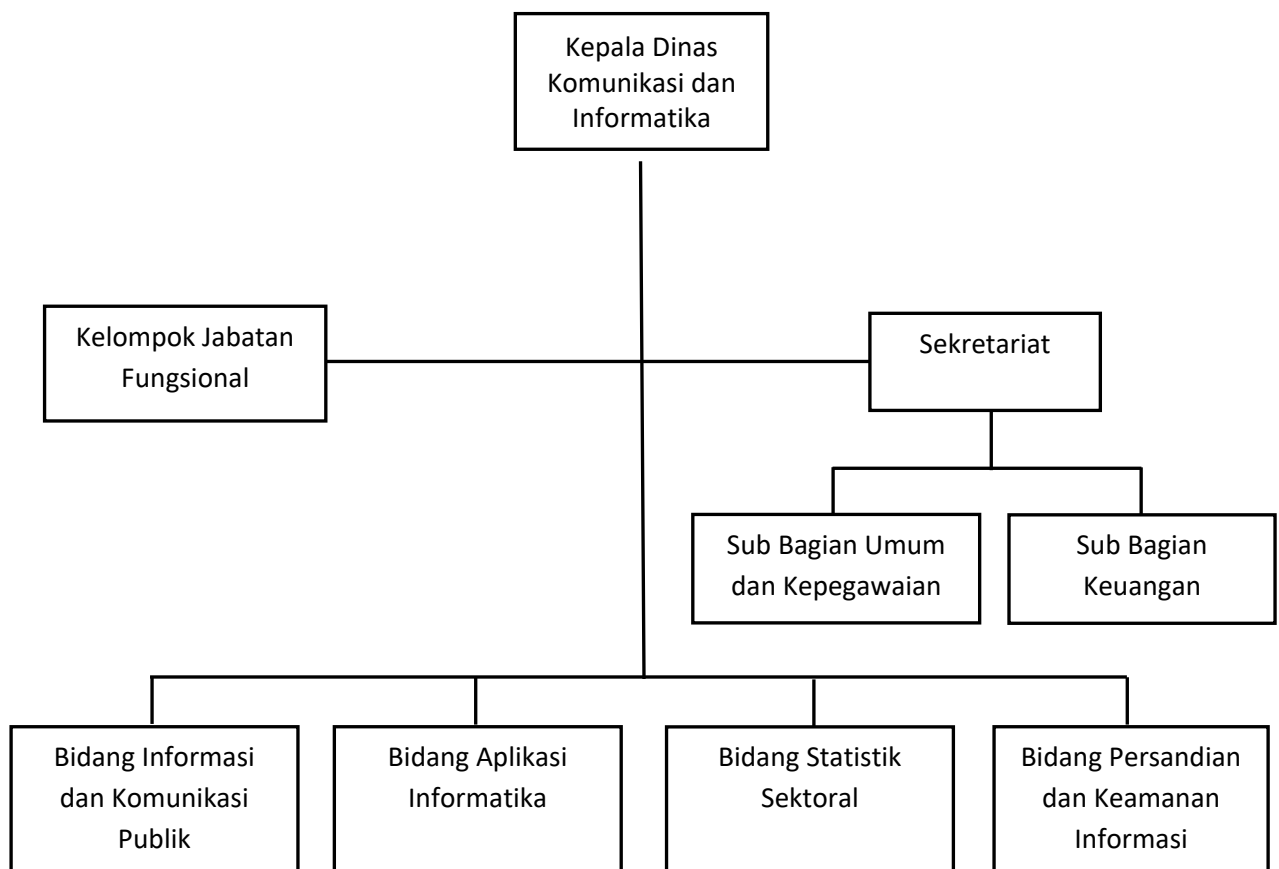
1. Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Perumusan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Perumusan administrasi kebijakan Pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Perumusan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Sub bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara



1.3. Isu Strategis dan Permasalahan

Adapun isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana TIK
2. Belum Optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pembangunan Satu data Digital Daerah
4. Integrasi Pelayanan digital pemerintah daerah melalui Sumut Smart province
5. Pengamanan Informasi dilingkup Pemerintah
6. Rendahnya SDM aparatur dibidang Persandian dan statistik

1.4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 000.6.3/12/2024 tanggal 05 Januari 2024 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK)

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

- menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, adalah meningkatkan Infrastruktur TIK, pengolahan Data dan diseminasi Informasi dan Komunikasi. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya implementasi SPBE	Peningkatan Prasarana layanan TIK	Indeks penilaian Mandiri SPBE	-	-	4	4,2	4,5
2		Peningkatan Satu data Digital Daerah	Indeks pembangunan Statistik	-	-	1,8	2,2	2,3
3		Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	75 %	76 %	77 %
			Indeks keterbukaan Informasi Publik	-	-	85 %	85 %	86 %

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Periode 2024 -2026

Indikator Kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 tidak sama dengan Tahun 2024 .

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya implementasi SPBE	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	point	SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, Masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai yang mempresentasikan Tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{10} \sum_{j=1}^n N_{Dj} \times B_{Dj}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.	Dinas Kominfo Provsu
2.	Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital Daerah	Indeks pembangunan Statistik	point	Indeks Pembangunan Statistik adalah ukuran yang menggambarkan kematangan penyelenggaraa	Nilai IPS : a. $4,2 > 5,0 =$ Memuaskan b. $3,5 < 4,2 =$ Sangat baik	BPS Pusat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
				n statistik sektoral Indeks Pembangunan Statistik dihitung melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral instansi pemerintah pada setiap domain, aspek dan indikator.	c. $2,6 < 3,5 =$ Baik d. $1,8 < 2,6 =$ Cukup e. $< 1,8 =$ Kurang	
3.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	persen	Indeks Pengelolaan Informasi Publik digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian/ Lembaga, dan Dinas Kominfo	Survey yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo RI	Kementerian Kominfo RI
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi Pusat	Komisi Informasi Pusat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Berikut Rencana Kinerja

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya implementasi SPBE	1.	Peningkatan Prasarana layanan TIK	Indeks penilaian Mandiri SPBE	point	4
		2.	Peningkatan Satu data Digital Daerah	Indeks pembangunan	Point	1,8
		3.	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persen	75
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	persen	85

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kominfo Provsu

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk konten tematik, dan agenda prioritas nasional) Tema : Protokol Kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	80 %
2.	Meningkatnya Satu Data Digital Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	91 %
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi	2 %
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	5 orang

Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ada Perubahan, Hal ini karena adanya evaluasi dari perbaikan Pohon Kinerja .

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	4
2.	Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,8
3.	Meningkatnya penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	75 %
		Indeks keterbukaan Informasi Publik	85

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Sasaran Strategis Meningkatkan penguatan tata Kelola informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik ada kesalahan dalam menentukan satuannya bukan persen tetapi Nilai , tetapi untuk Indeks pengelolaan

Informasi dan Komunikasi Publik satuannya Persen karena berdasarkan hasil pegisian quisioner dan sumber data survei yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo RI.

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan TIK yang disediakan oleh dinas	100 %
	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprovsu	100 %
	Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit
	Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen
	Sub Kegiatan : 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e- Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem provinsi cerdas dan Kota cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen
	3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit
	4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit
2	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai	100 %

		dengan strategi komunikasi	
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Tersebar nya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah	100 %
	Sub Kegiatan : 1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	27 Dokumen
	2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	980 dokumen
	3. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen
	4. Kemitraan dengan Pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 dokumen
	5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen
	6. Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 layanan
	7. Penguatan tata Kelola Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 dokumen
	8. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	12 dokumen
3	Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan data statistik sektoral	99 %
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprovsu	99 %
	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100 dokumen
	2. Penyelenggaraan otoritas Statistik Sektoral di daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	200 dokumen
	3. Membangun Metadata Statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 OPD

4	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi	98 %
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik serta Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	98 %
	Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 dokumen
	2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 laporan
	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	10 perangkat daerah
	Sub Kegiatan : 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 perangkat daerah

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nama Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kineja tahun ini

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	4	4,34	108,5	Dinas Kominfo provsu
	Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,8	1,94	107,8	BPS Pusat
	Meningkatnya penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	75 %	81,04 %	108	Kementrian Kominfo RI
		Indeks keterbukaan Informasi Publik	85 %	82,07 %	96,6	Komisi Informasi Pusat

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel:

- I. Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatkan Implementasi sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Penilaian Mandiri SPBE dengan target 4. Pencapaian nilai indeks SPBE

Pemprovsu tahun 2024 pada tahap penilaian mandiri sebesar 4,34 yang berarti melampaui target yang ditetapkan dimana penilaian dilakukan pada 47 (empat puluh tujuh) indikator yang di kelompokkan dalam 8 aspek dan 4 domain. Nilai Domain Kebijakan 5.0, nilai domain Tata Kelola SPBE 3,90, nilai Domain Manajemen SPBE 3,36 dan nilai domain Layanan SPBE 4,75. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun proses pemantauan dan evaluasi SPBE dimulai dengan tahapan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal Pemprovsu.

Adapun Program yang mendukung pelaksanaan SPBE adalah
A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

- 1). Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 8.125.786.800 dengan realisasinya Rp. 8.048.658.000,- (99,05 %)

- 2). Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah daerah Provinsi dengan sub kegiatan : a). Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggran Rp. 147.500.000,- realisasi Rp. 134.391.490,-, (91,11%) ; b). Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah anggarannya Rp. 14.850.727 dengan rtealisasi Rp. 14.652.000,-;(98,66 %), c). Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan anggarannya Rp. 108.889.020,- realisasinya Rp. 55.286.687,- (50,77 %) ; d). Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas dengan anggaran Rp. 2.000.000,- dengan realisasinya Rp. 2.000.000

B. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamnan Informasi

Indeks Keamanan Informasi merupakan bagaian pencapaian Indeks SPBE, tahun 2024 target Indeks Keamanan Informasi sebesar 450, sedangkan pencapaian tahun 2024 sebesar 452 atau 100,4%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah:

I. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- a). Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi anggarannya sebesar Rp. 74.482.900,- dengan realisasinya Rp. 73.948.900,- (99,28%) melalui kegiatan ini telah dihasilkan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dimana untuk perkembangan sedang dilaksanakan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI.

- b). Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggarannya Rp. 100.000.000,- dengan realisasinya Rp. 99.900.000,- (99,90%)
- II. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, anggarannya sebesar Rp. 72.173.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.007.490, (87,30%) Untuk kegiatan ini Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi sebanyak 42 OPD Provinsi Sumatera Utara

II). Untuk sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Tahun 2024 ditargetkan 1,8 dan realisasi pencapaian 1,94 dengan persentase pencapaian 107,8%. Capaian Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera Utara juga meningkat 0,44 poin dari tahun sebelumnya hanya 1,50.

Indikator Kinerja Utama yang mendukung Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral , kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- a). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp166.043.350,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.164.155.450,- (98,86%) dengan dihasilkannya 200 Dokumen Koordinasi dan Pembinaan yang dilakukan.

- b) Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun melalui kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.748.900,- dan realisasi sebesar Rp. 12.100.000,- (94,91%) Dimana terdapat 39 Perangkat Daerah yang sudah menyampaikan Metadata Statistik dibandingkan target sebanyak 10 Perangkat Daerah yang menyampaikan Metadata dan jumlah ini juga meningkat dari tahun sebelumnya
- c) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.624.450,- dan realisasi Rp. 45.624.450 (97,86 %) , dimana jumlah Data Statistik Sektoral yang dihasilkan sebanyak 627 data.

III). Sasaran Strategis meningkatnya penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) target 75 persen dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 85%. ndeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan tolok ukur pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Indeks PIKP sebagai instrumen strategis guna mewujudkan komunikasi publik yang lebih baik, lebih transparan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun skor indeks PIKP rata rata nasional pada tahun 2024 berdasarkan survey Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai 71,79 poin naik satu poin dari tahun sebelumnya. Untuk capaian Sumatera Utara, Nilai

Berdasarkan nilai survei Indeks Pengelolaan Informasi Publik yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika nilai Indeks PIKP Gabungan Sumatera Utara adalah 81,04 atau kategori sangat baik. Nilai gabungan terdiri dari nilai dimensi Input : 90,82; Dimensi proses : 91,18; Dimensi Output : 71,72 dan dimensi Outcome : 70,43. Indeks PIKP Sumut meningkat pesat dari tahun 2023 dengan Nilai Indeks PIKP Gabungan sebesar 69,8 % atau kategori sedang. Dengan

demikian target sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 tercapai bahkan jauh melampaui. Peningkatan nilai IPKP tahun 2024 menunjukkan terdapat peningkatan akses informasi dan pemahaman publik akan kebijakan dan program pemerintah yang diharapkan mendorong partisipasi publik yang lebih luas.

Untuk Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumatera Utara pada tahun 2024 adalah 82,07. Nilai ini juga naik 2,40 poin dari tahun sebelumnya yaitu 79,67 dan berada di atas nilai nasional yaitu 75,65. Dengan nilai ini, Sumut menduduki urutan kelima Nilai IKIP tertinggi nasional

Peningkatan skor IKIP menunjukkan upaya menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kominfo. Skor ini mencerminkan sejauh mana pemerintah dan stakeholder di Sumut telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Capaian kinerja tersebut di atas dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri atas Sub kegiatan berikut:

- a) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan anggarannya Rp. 396.005.000,- dengan realisasinya Rp. 388.905.000,- (98,21%);
- b).Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran Rp. 342.458.250 realisasinya Rp.342.178.250,- (99,92%);
- c). Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran Rp. 9.704.339.525,- dengan realisasinya Rp. 9.251.125.280,- (95,33%);
- d). Pelayanan Informasi Publik dengan anggarannya Rp. 79.804.650,- dengan realisasinya Rp. 79.304.650,- (99,37%);

- e). Layanan Hubungan Media dengan anggaran Rp. 259.866.000,-
realisasinya Rp. 259.866.000,- (100%);
- f). Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dengan anggaran Rp.
4.580.800.000,- dengan realisasinya Rp. 4.565.550.000,-
(99,67%);
- g). Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan
anggarannya Rp. 1.967.918.000,- realisasinya Rp.
1.956.238.707,- (99,41%);
- h). Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan
Komunitas dengan anggarannya Rp. 108.000.000,- realisasinya
Rp. 108.000.000,- (100%).

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari masing-masing indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menunjang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selain itu juga realisasi dari capaian Indikator kinerja sudah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja				Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Sumber Data 2024
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)				(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik	Meningkatnya penguasaan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Jumlah informasi yang terpublikasi	Jumlah informasi yang terpublikasi	Jumlah informasi yang terpublikasi	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	937 kali	937 kali	1386 kali	1384 kali	1013 kali	1013 kali	75 %	81,04 %	Kementerian Kominfo RI
								Indeks keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	85 %	82,07 %	Komisi Informasi
	Meningkatnya kualitas data pemanfaatan Sumatera Utara	Meningkatnya kualitas data pemanfaatan Sumatera Utara	Meningkatnya kualitas data pemanfaatan Sumatera Utara	Meningkatnya Pemanfaatan satu data digital daerah	Persentase data OPD yang terhimpun	Persentase data OPD yang terhimpun	Persentase data OPD yang terhimpun	Indeks Pemanfaatan Statistik (IPS)	87 %	87 %	90 %	92 %	90 %	100%	1,8	1,94	Bidang Statistik

		Meningkatnya pelaksanaan Sistem Berbasis elektronik	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Berbasis elektronik	Meningkatnya Implementasi Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi		Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	55 %	57 %	65 %	71 %	75 %	92 %	4	4,34	Bidang TIK
	Meningkatnya pengelolaan Persandian dan keamanan informasi	Meningkatnya pengelolaan Persandian dan keamanan informasi	Meningkatnya pengelolaan Persandian dan keamanan informasi	-	Persentase perangkat daerah yang memahami persandian dan keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang memahami persandian dan keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang memahami persandian dan keamanan informasi	-	20 %	26 %	30 %	61 %	50 %	100 %	-	-	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara periode 2024 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Jangka Menengah Rencana Strategis			Tingkat Kemajuan
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)=4/5 *100
1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	4,34	4	4,5	4,8	96,4
2.	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,94	1,8	2	2,2	97 %
3.	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP)di daerah	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	81.04 %	75	76 %	77 %	107 %
		Indeks keterbukaan Informasi Publik	82.07	85	85	85	96,6 %

Sumber : Sub bagian Keuangan Dinas Kominfo Provsu

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1.94	2,35 (BPS RI)
				3,38 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP) di daerah	Indeks pengelolaan Informasi dan dan Komunikasi Publik	81,04 %	87 % (Nasional)
				84,29 % Provinsi DKI Jakarta
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara	82,07	90 (Nasional)
				83.83 Provinsi Jawa Timur

Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan standar nasional belum mencapai target nasional, hal ini disebabkan eluruh aspek belum mencapai predikat baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi .Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera Utara meningkat dari tahun sebelumnya dari 1.50 menjadi 1.94 dengan kategori Cukup. Nilai ini diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang menilai 5 Domain, 19 Aspek dan 38 Indikator dengan pembobotannya masing-masing, demikian juga dengan Indeks Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dengan kategori Sangat Baik.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	4	4,34	108,5
	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,8	1,94	107,8
	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP) di daerah	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Sumut	75 %	81,04 %	108
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85	82,07	96.6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Analisa keberhasilan

Uraian penjelasan tabel :

Analisis Keberhasilan, Permasalahan dan Alternatif Solusi.

Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2024. Hal tersebut didorong oleh komitmen Pimpinan dan sistem kerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa manfaat teknologi informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Indeks Penilaian Mandiri SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 diperoleh 4,34 dengan predikat memuaskan, dari target 4,0 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 diperoleh 3,21. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Indeks Penilaian Mandiri SPBE 4,34 diperoleh dari pencapaian nilai indeks yang ditetapkan pada 47 indikator yang dikelompokkan dalam 8 aspek dan 4 domain. Yaitu : Nilai Domain Kebijakan 5,0, Nilai domain Tata Kelola SPBE 3,90, Nilai Domain Manajemen SPBE 3,36 dan Nilai domain Layanan SPBE 4,75.

Dalam rangka implementasi SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang telah diterapkan antara lain:

Faktor Pendukung :

- a. Penyediaan sarana internet pada lokasi yang dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik kapan saja di area publik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor pemerintah secara langsung;
- b. Proses integrasi sistem yang terus dikembangkan dapat menjadi sarana otomatisasi yang meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat penanganan permintaan;
- c. Penyediaan informasi tentang layanan publik online pada ruang komunikasi publik sehingga memperbesar publikasi kepada masyarakat tentang layanan berbasis digital yang dimiliki Pemerintah, terutama terkait dengan persyaratan layanan publik, mekanisme, dan kebijakan pemerintah. Informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pemerintah;
- d. Pengembangan sistem keamanan informasi terhadap data pribadi masyarakat yang masuk dalam sistem layanan publik online akan terus diterapkan dengan berbasis kebijakan dan pengembangan teknologi/infrastruktur digital.

Faktor Penghambat :

- a. Tidak semua orang memiliki akses internet atau perangkat digital yang setara, sehingga mungkin ada kesenjangan aksesibilitas;
- b. Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi isu penting yang harus diatasi agar masyarakat merasa aman menggunakan layanan online;
- c. Beberapa warga mungkin tidak memiliki keterampilan digital yang cukup untuk menggunakan layanan online, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital;

- d. Tantangan teknis terkait integrasi sistem yang berbeda dalam penyediaan layanan publik online;
- e. Penting untuk memastikan bahwa layanan online mematuhi peraturan dan kebijakan privasi yang berlaku;
- f. Diperlukan infrastruktur yang memadai, seperti konektivitas internet yang cepat dan handal, untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik online.

Solusi alternatif yang telah dilakukan :

- a. Optimalisasi pemanfaatan pusat data nasional dan melaksanakan audit internal TIK;
- b. Disusunnya regulasi turunan dari Pergub Nomor 12 tahun 2022 tentang Tata Kelola SPBE.

2. Sasaran Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital Daerah dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 diperoleh 1,94 dari target 1,8 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 diperoleh 1,50. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2024 1,94 diperoleh dari 5 domain yaitu :

- 1) Domain Prinsip Satu Data Indonesia dengan Nilai Indeks 1,25 diperoleh dari 4 aspek yaitu :
 - a. Standar Data Statistik dengan Nilai Indeks 1,00
 - b. Metadata Statistik dengan Nilai Indeks 1,00
 - c. Interoperabilitas Data dengan Nilai Indeks 1,00
 - d. Kode Referensi dan/atau Data Induk dengan Nilai Indeks 2,00
- 2) Domain Kualitas Data dengan Nilai indeks 1,95 diperoleh dari 5 aspek yaitu :
 - a. Relevansi dengan Nilai Indeks 1,00
 - b. Akurasi dengan Nilai Indeks 3,00
 - c. Aktualitas & Ketepatan Waktu dengan Nilai Indeks 1,00
 - d. Aksesibilitas dengan Nilai Indeks 3,00

- e. Keterbandingan & Konsistensi dengan Nilai Indeks 2,00
- 3) Domain Proses Bisnis Statistik dengan Nilai indeks 2,47 diperoleh dari 4 aspek yaitu :
 - a. Perencanaan Data dengan Nilai Indeks 2,33
 - b. Pengumpulan Data dengan Nilai Indeks 3,00
 - c. Pemeriksaan Data dengan Nilai Indeks 2,50
 - d. Penyebarluasan Data dengan Nilai Indeks 2,00
- 4) Domain Kelembagaan dengan Nilai Indeks 2,18 diperoleh dari 3 aspek yaitu :
 - a. Profesionalitas dengan Nilai Indeks 2,25
 - b. SDM yang Memadai dan Kapabel dengan Nilai Indeks 2,00
 - c. Pengorganisasian Statistik dengan Nilai Indeks 2,25
- 5) Domain Statistik Nasional dengan Nilai Indeks 2,34 diperoleh dari 3 aspek yaitu :
 - a. Pemanfaatan Data Statistik dengan Nilai Indeks 2,67
 - b. Pengelolaan Kegiatan Statistik dengan Nilai Indeks 3,00
 - c. Penguatan SSN Berkelanjutan dengan Nilai Indeks 1,33

Dalam rangka Pembangunan satu data digital Provinsi Sumatera Utara terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah diterapkan antara lain:

Faktor Pendukung :

- a. Keterisian data setiap triwulan untuk pemenuhan data tepat waktu;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan SDM yang ada seperti: bimtek, webinar dan lain – lain;
- c. Memberikan penghargaan bagi Verifikator dan Operator Terbaik Perangkat Daerah, sehingga mendorong semangat untuk selalu aktif menyerahkan data;
- d. Menyediakan layanan untuk memberikan konsultasi statistik, survei statistik dan permohonan data statistik sektoral.

Faktor Penghambat :

- a. Data di Portal SADAINA Sumut belum dipenuhi pengisian oleh Produsen Data;
- b. Beberapa data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah masih perlu rekonsiliasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat rilis;
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Statistisi di Perangkat Daerah.

Solusi alternatif yang telah dilakukan :

- a. Pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral dan satu data Indonesia di lingkungan OPD Pemprovsu.
- b. Pemenuhan bukti dukung setiap aspek domain penilaian.

3. Sasaran Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP) di daerah dengan Indikator Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Sumut tahun 2024 diperoleh 81,04 % dari target 75 % mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 diperoleh 69,8%. Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Sumut diperoleh dari nilai gabungan terdiri dari nilai dimensi input 90,82, dimensi Proses 91,18, dimensi Output 71,72 dan dimensi Outcome 70,43.

Dalam rangka Penguatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Sumatera Utara terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah diterapkan antara lain:

Faktor Pendukung:

- a. Peningkatan sumber daya dan sarana prasarana komunikasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Kabupaten Kota dan Lingkup Organisasi Perangkat Daerah

diantaranya dalam pelayanan informasi publik. Untuk itu perlu membuat kebijakan yang dapat mendorong terpenuhinya sumber daya dan sarana prasarana komunikasi publik dalam setiap organisasi.

- b. Diperlukan penguatan pertemuan koordinasi secara berkala untuk meningkatkan koordinasi dan orkestrasi dalam penatakelolaan informasi dan komunikasi di daerah;
- c. Dibutuhkan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik yang ada.
- d. Menyediakan media Komunikasi yang dapat menjangkau seluruh Khalayak.

Faktor Penghambat :

- a. Sumber daya dan sarana prasarana komunikasi publik yang belum mencukupi dan merata. Baik untuk lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, demikian juga pada lingkup OPD dan Kabupaten Kota. Hal ini menyebabkan belum optimalnya tata Kelola pengelolaan informasi dan komunikasi di daerah;
- b. Masih terdapat kendala dalam koordinasi antar instansi dalam penatakelolaan informasi dan komunikasi di daerah;
- c. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan sulitnya Sumber Daya Komunikasi Publik untuk mengikuti perkembangan kehumasan di dunia digital
- d. Sebaran Khalayak yang sangat luas.

Solusi alternatif yang telah dilakukan :

- a. Melakukan sosialisasi dan diseminasi melalui media luar ruang, media cetak dan media elektronik.

4. Sasaran Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik di daerah dengan Indikator Indeks

Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 diperoleh 82,07 dari target 85 sedangkan pada tahun 2023 diperoleh 79,69 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik diperoleh dari penilaian 3 dimensi yaitu Dimensi Politik 85,34; Dimensi Ekonomi 84,8 dan Dimensi Hukum 76,19.

Dalam rangka Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah diterapkan antara lain:

Faktor Pendukung :

- a. Koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan melalui pendampingan, monev serta pelatihan dan pembinaan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Sumatera Utara seperti Bimbingan Teknis PPID, Rakor PPID, FGD PPID;
- b. Konsultasi serta pendampingan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Sumatera Utara kepada PPID Pelaksana (PD).

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya pemahaman pengelola PPID terhadap implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada instrument PPID seperti penyusunan DIP, uji konsekuensi dan cara menjawab permohonan informasi, sehingga menyebabkan PPID tidak berjalan optimal;
- b. Beberapa masih menganggap PPID sebagai tugas tambahan sehingga tidak dilaksanakan secara optimal.

Solusi alternatif yang telah dilakukan :

- a. Melakukan pengisian kuesioner dan presentase uji publik tentang pemprovsu.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	4,34	108,5	8.624.443.247,-	8.489.844.567,-	98,44
	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah	1,8	1,94	107,8	225.416.700,-	221.879.900,-	98,43
	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP) di daerah	75 %	81,04	108	17.439.191.525	16.951.167.887	97,20

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kominfo Provsu

Uraian penjelasan tabel:

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan anggaran sebesar

Rp 26.310.291.122,- dan realisasinya Rp. 25.662.892.354,- (97,54 %) dengan kategori sangat tinggi.

Peningkatan sumberdaya aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan yaitu Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi . Bimtek dan workshop sehingga diharapkan dapat dihasilkan sumberdaya Aparatur yang handal dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

[illegible]

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintah Daerah provinsi				
	Meningkatnya Pembangunan satu data digital Daerah	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	1,94	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase OPD yang Menggunakan data statistik sektoral	98,43	Menunjang	
	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP)di daerah		81,04	Program: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	97,20	Menunjang	

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kominfo Provsu

B. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber

daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp. 57.261.211.686,-
APBD	Tahun 2024	Rp. 59.976.542.490,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3. Pelayanan Informasi Publik 4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5. Layanan Hubungan Media 6. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan 7 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 8 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 17.439.191.525.- Rp 17.439.191.525.- Rp 396.005.000,- Rp 342.458.250,- Rp 79.804.650,- Rp 9.704.339.525,- Rp 259.866.000,- Rp 4.580.800.000,- Rp 1.967.918.100,- Rp 108.000.000,-	Rp 16.951.167.887.- Rp 16.951.167.887.- Rp 388.905.000,- Rp 342.178.250,- Rp 79.304.650,- Rp 9.251.125.280,- Rp 259.866.000,- Rp 4.565.550.000,- Rp 1.956.238.707,- Rp 108.000.000,-	97,20% 97,20% 98,21% 99,92% 99,37% 95,33% 100% 99,67% 99,41% 100%
2.	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2.Membangun Metadata Statistik Sektoral 3.Penyelenggaraan Otoritas Statistik	Rp 225.416.700,- Rp 225.416.700,- Rp 166.043.350,- Rp 12.748.900,- Rp 46.624.450,-	Rp 221.879.900,- Rp 221.879.900,- Rp 164.155.450,- Rp 12.100.000,- Rp 45.624.450,-	98,43% 98,43% 98,86% 94,91% 97,86%

3.	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 8.399.026.547,- Rp 8.125.786.800,- Rp 8.125.786.800,- Rp 273.239.747,- Rp 147.500.000,- Rp 2.000.000,- Rp 14.850.727,- Rp 108.889.020,-	Rp 8.252.988.177,- Rp 8.048.658.000,- Rp 8.048.658.000,- Rp 204.330.177,- Rp 134.391.490,- Rp 2.000.000.- Rp 14.652.000,- Rp 55.286.687,-	98,26% 99,05% 99,05% 74,78% 91,11% 100% 98,66% 50,77%
----	--	--	---	--

4.	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 246.656.350,-	Rp 236.856.390,-	96,03%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 174.482.900,-	Rp 173.848.900,-	99,64%
	Sub Kegiatan : 1.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 74.482.900,-	Rp 73.948.900,-	99,28%
	2.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 100.000.000,-	Rp 99.900.000,-	99,90%
	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Rp 72.173.450,-	Rp 63.007.490,-	87,30%
	Sub Kegiatan : 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 72.173.450,-	Rp 63.007.490,-	87,30%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kominfo Provsu Ta. 2024

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dengan pagu Anggaran Rp.59.976.542.490,- dengan realisasinya Rp. 57.261.211.686,- (95,47 %). dengan kategori sangat tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dimana masing-masing sasaran strategis tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- a. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) indikatornya Indeks Penilaian Mandiri SPBE dengan target 4 realisasi 4,38 dengan persentase kinerjanya 108,5% ;
- b. Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital Daerah, indikatornya Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan target 1,8 realisasinya 1,94 dengan persentase kinerjanya 107,8%

- c. Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah, ada 2 (dua) indikatornya : 1) Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Sumut dengan target 75% realisasinya 81,04% persentase capaian kinerjanya 108 %; (2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik target 85 realisasinya 82,07 dengan persentase capaian kinerja 96,6%

Langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara;
2. Melibatkan pihak terkait, termasuk stakeholder internal dan eksternal, untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang dapat membantu dalam perencanaan perbaikan kinerja;
3. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah dan kemudian memberikan masukan untuk perbaikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aplikasi yang akan dibangun harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamanan informasi;
4. Memperbarui rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencakup tujuan dan inisiatif baru yang mendukung perbaikan kinerja dan mengatasi tantangan yang dihadapi;
5. Menentukan rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan strategis. Identifikasi langkah-langkah konkret yang harus diambil, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan;
6. Melakukan pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan tugas yang semakin kompleks;

7. Memperbarui atau meningkatkan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan memastikan bahwa sistem dan perangkat yang digunakan mendukung efisiensi operasional dan pemenuhan tugas;
8. Meningkatkan sistem keamanan informasi untuk melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman siber. Implementasikan praktik keamanan terbaik untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data;
9. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait, baik itu instansi pemerintah lain, sektor swasta, atau lembaga akademis. Kolaborasi dapat meningkatkan pertukaran informasi dan sumber daya;
10. Memantau dan mengadopsi inovasi teknologi terkini yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Mengevaluasi dan menguji coba teknologi baru yang dapat mendukung tujuan organisasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada periode mendatang.

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara



DR. ILVAS S. SITORUS, SE, M.Pd
Penbina Utama Muda
NIP. 196701191988031002

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA			
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara			
Tahun : 2024			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik	Persentase Melayak yang tercapai informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk kabin (nasional, dan agenda prioritas nasional) tema : Protokol Kesehatan, Vaksin, Stunting, SD) Sesuai Strategi Komunikasi	87%
2	Meningkatkan Satu Data Digital Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata ke sistem pusat	95%
3	Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan manfaat layanan melalui SPBE yang diadopsi oleh Daerah	2%
4	Meningkatkan penguatan pendataan dan keamanan Informasi Daerah	Jumlah tulus peningkatan kompetensi SDM pengelola sistematis Siber	5 orang

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penguatan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 7.351.688.000	APBD dan DPH-CHT
2. Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 92.973.980	APBD
3. Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 310.845.500	APBD
4. Penyelenggaraan Perencanaan untuk Penguatan Informasi	Rp. 100.000.000	APBD
TOTAL	Rp. 8.095.507.480	

Medan, 26 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 196701191988031002

Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 196701191988031002

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Dilampirkan Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONG, M.Si
Jabatan : PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medsn, 2024

Pihak Kesatu,
PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Dr. Drs. A. FATONG, M.Si

Medsn, 2024
PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
PEMUDA UTARA MELIA
NIP. 196701119198031002

**LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Peningkatan SPBE	4
2	Meningkatkan Pengembangan Satu Data Digital	Indeks Pengembangan Satu Data Digital	1,8
3	Meningkatkan Pengaplikasian Sistem Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP) di Daerah	Indeks Peningkatan Efektivitas dan Komparasi Publik	75%
		2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85%

Program	Anggaran	Aktifitas
1. Pengembangan Sistem dan Komunikasi Publik	Rp. 17.436.151.525	P. APBD dan DANA CBT
2. Pengembangan Statistik Sektor	Rp. 222.424.700	P. APBD
3. Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 5.395.628.347	P. APBD
4. Pengembangan Pemanfaatan Lintas Pemanfaatan Informasi	Rp. 246.856.350	P. APBD
TOTAL	Rp. 26.310.261.122	

Medsn, 2024

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Dr. Drs. A. FATONG, M.Si

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
PEMUDA UTARA MELIA
NIP. 196701119198031002

Diisi matriks Renstra Dinas Kominfo Provsu selama 5 tahun

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ

[illegible]

1	1	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
2	2	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
3	3	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
4	4	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
5	5	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
6	6	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
7	7	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
8	8	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
9	9	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
10	10	Technische Dienstleistungen für die Errichtung und Inbetriebnahme von 2000 m² Stahl- und Holztragwerk für ein Mehrfamilienhaus (MfH) mit 10 Wohneinheiten.	8.000,-	10.000,-	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-

				1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	4
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	4
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	4
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201																																																																																																																																																																																																																																																																									

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

[illegible]

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah

Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari

Inspektorat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT
Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 8 Medan

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 144/14-06/17/PMU
TANGGAL : 12 Juli 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT
Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kota Pks 20134
Telp: 061-4155811-4155810, Fax: 061-4155814
Email: inspektorat@provinsisumutara.go.id, Laman: inspektorat.provsumutara.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Privasi Nomor 7092/2023/Provsumutara tanggal 1 April 2024 selanjutnya (selanjutnya) hari kerja dan tanggal 1 April s.d. 15 April 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi bertujuan untuk memberikan keyakinan terdapat mengatahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendukung pengikatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015,
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.

2.

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengisian Berprestasi dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024

C. Maksud dan Tujuan

Maksud evaluasi AKIP yaitu untuk mengetahui aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, audit, apresiasi dan pengendalian permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

3.

Tujuan evaluasi adalah:

- Memberikan keyakinan terdapat mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendukung peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara,
- Tersusunnya rekomendasi atas peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

II. PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 1 April s.d. 15 April 2024 selanjutnya (selanjutnya) hari kerja.

B. Susunan Keanggotaan

Tim evaluasi terdiri dari:

- Penanggung Jawab: Lasso Marhan
- Wakil Penanggung Jawab Administrasi: Murdanto
- Wakil Penanggung Jawab Teknis: Riwani Arianing
- Pengendali Teknis: Syahrul Bahri Ritonga
- Ketua Tim: Elvina Lubis
- Anggota: Jimmy H. Sihotang, Bedan Suherman

C. Batasan Evaluasi

Batasan evaluasi mencakup pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Penyimpulan Data dan Informasi

Nilai hasil akhir dari penyimpulan indikator memberikan gambaran tingkat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori interpretasi sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
> 50 – 100 (AA)	Sangat Memuaskan
> 80 – 90 (A)	Memuaskan

4.

> 70 – 80 (BB)	Sangat Baik
> 60 – 70 (B)	Baik
> 50 – 60 (CC)	Cukup (Memadai)
> 30 – 50 (C)	Kurang
0 – 30 (D)	Sangat Kurang

III. TAKTAK DAN PERMASALAHAN

Setelah melaksanakan evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, ditemukan fakta dan permasalahan sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dengan tugas sebagai kualitas perencanaan kinerja yang selanjutnya akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan kriteria sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan indikator sebagai berikut:
 - Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah: sudah sesuai dengan RPJMD.
 - Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek: sudah tersedia dengan adanya Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Eselon II (R dan Fungsional).
 - Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja: sudah tersedia pada rencana aksi.
 - Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja: sudah tersedia pada DPA Perangkat Daerah.
- Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (Cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting) dengan indikator sebagai berikut:
 - Dokumen perencanaan kinerja telah diformulasikan dengan dibuatnya tim kerja dan cap hasil.
 - Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu: sudah dipublikasikan pada website dan media sosial lainnya.

5.

- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, sudah dimuat dalam Renja namun belum secara keseluruhan;
- Kualitas rumusan hasil (Tugas/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART dan KU sudah SMART;
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, terdapat secara berkelanjutan (sustainable) tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis; IKU telah disesuaikan dengan target nasional;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis sudah terdapat;
- Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), sudah terdapat;
- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/organisasi dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), sudah tersedia dengan melibatkan stakeholder terkait;
- Setiap pegawai menumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, sudah ditetapkan.

3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan indikator sebagai berikut:

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, sudah termuat dalam DPA, kegiatan dan program telah sesuai;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, sudah termuat dalam DPA namun belum secara menyeluruh, aktivitas telah sesuai;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.

6.

- Terdapat pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis pedoman kinerja sebelumnya, terdapat laporan evaluasi dan pendataan dokumen perencanaan;
- Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkolaborasi dalam mencapai kinerja yang telah dirumuskan.

B. Pengukuran Kinerja

- Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan cara:
 - Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
 - Terdapat indikator yang jelas metode pengukuran data kinerja yang dapat diandalkan, mekanisme pengumpulan data masih berdasarkan asumsi dari isu permasalahan.
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi dengan indikator sebagai berikut:
 - Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang ditetapkan, pengumpulan data kinerja telah relevan secara menyeluruh;
 - Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang ditetapkan, telah dilaksanakan secara pencapaian target kinerja pada aplikasi monev;
 - Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala;
 - Setiap level organisasi melakukan penanaman atau pengukuran kinerja untuk di bawahnya secara berjenjang, pengukuran kinerja diperoleh secara berkala;
 - Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (jika ada), hanya menggunakan ms. word, tidak aplikasi monev;
 - Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (jika ada), hanya menggunakan ms. word, bukan aplikasi monev;
- Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan indikator sebagai berikut:

7.

- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;
- Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur capaian kinerja definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada pedoman yang ada atau mengacu kinerja;

C. Pelaporan Kinerja

- Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan indikator sebagai berikut:
 - Dokumen laporan kinerja telah disusun, sudah disusun;
 - Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, belum dilakukan secara berkala;
 - Dokumen laporan kinerja telah disusun, belum dilakukan secara berkala;
 - Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan, sudah dipublikasikan di website;
 - Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu, sudah sesuai;
- Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar pengumpulan data atau pencapaian kinerja, informasi telah berkesinambungan

8.

kinerja serta upaya peningkatan/penyempurnaan dengan indikator sebagai berikut:

- Dokumen laporan kinerja telah diformulasikan, disusun telah dibuat terdapat dan cap hasil;
- Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan secara jelas informasi tentang pencapaian kinerja, sudah menggunakan indikator;
- Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, data sudah diisikan di laporan kinerja;
- Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, data sudah diisikan pada laporan kinerja;
- Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, data sudah diisikan;
- Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), tidak ada memuat perbandingan dengan nasional;
- Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kualitas atau capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau landasan hukum yang mendukung sektor pendukung dan penghubung pada Laporan Kinerja;
- Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan efisiensi atau penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, sudah diisikan dalam laporan kinerja;
- Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan upaya perbaikan dan pengembangan kinerja ke depan (berkesinambungan perbaikan kinerja), rekomendasi belum diisikan secara 100%;

3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kegiatan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan indikator sebagai berikut:

- Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi pedoman utama pimpinan (penanggung jawab), sudah dilakukan;

- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kapadukan seluruh pegawai, sudah disampaikan namun belum secara menyeluruh.
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja, dilakukan secara berkala dan belum secara menyeluruh untuk menyesuaikan aktivitas kinerja.
- d. Informasi dalam laporan kinerja belum telah digunakan dalam penyusunan pengumpulan pegawai untuk mencapai kinerja, sudah dilakukan namun belum secara keseluruhan.
- e. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.
- f. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.
- g. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dengan indikator: Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, rekomendasi belum ditindaklanjuti secara menyeluruh.
2. Capaian output dengan indikator: Tesit jejak perbaikan dan peningkatan kinerja (output) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.
3. Capaian outcome dengan indikator: Tesit jejak perbaikan dan peningkatan kinerja (outcome) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sudah dimanfaatkan hasil evaluasi sebagai perbaikan kinerja namun belum sesuai 50%.

IV. ANALISA

Berdasarkan fakta dan permasalahan, penilaian terhadap seluruh kriteria yang dievaluasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 76,65 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja memperoleh nilai 25,20 terdiri dari:
 1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan nilai 6,00;
 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik dengan nilai 7,20;
 3. Pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan untuk menunjukkan hasil yang berkembang dengan nilai 12,00.
2. Pengukuran kinerja memperoleh nilai 26,00 terdiri dari:
 1. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur dengan nilai 4,00;
 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebiasaan dalam mencapai kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan nilai 7,20;
 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan nilai 12,00.
3. Pelaporan kinerja memperoleh nilai 9,75 terdiri dari:
 1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan nilai 2,10;
 2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan nilai 3,15;
 3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/subjekan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan nilai 4,50.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 17,50 terdiri dari:
 1. Tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dengan nilai 6,00;
 2. Capaian output dengan nilai 2,50;
 3. Capaian outcome dengan nilai 6,30.

V. KESIMPULAN

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dilakukan guna memperoleh pengamatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dengan nilai sebagai berikut:

No	Kriteria	Nilai	Kategori
1.	Perencanaan Kinerja	25,20	B0
2.	Pengukuran Kinerja	26,00	
3.	Pelaporan Kinerja	9,75	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	
Total		78,45	

menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mendapatkan nilai 76,65 dengan kategori B0 (Sangat Baik) dan perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kategori A (Memuaskan) serta dipejatkan kategori nasional AA (Sangat Memuaskan).

VI. REKOMENDASI

- Atas hal tersebut, Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Inspektoral Provinsi Sumatera Utara menyarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara agar:
1. Meningkatkan aplikasi monitor untuk pengumpulan data kinerja dan mengkap capaian kinerja;
 2. Meninjau dokumen Laporan Kinerja;
 3. Dokumen Laporan Kinerja meningkatkan pemantauan realisasi kinerja di level nasional/kemendagri (benchmark kinerja);
 4. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kapadukan seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 5. Membuat Laporan Kinerja secara berkala (per bulan).

VI. PENUTUP

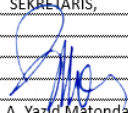
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama pelaksanaan evaluasi.

Laporan ini merupakan dokumen pengawasan yang bersifat rahasia, tidak bisa diberikan, disampaikan dan diterbitkan kepada pihak yang tidak berkepentingan (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017).

Medan, 2024	
Tim Evaluasi	
 Laila Martini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NIP. 198410511843511002	1. Mubandji NIP. 197202041998020001 Pada Penanggung Jawab Administrasi
	2. Rames Andriyong NIP. 197201031998020001 Wakil Penanggung Jawab Teknik
	3. Siregar dan Siregar NIP. 198002041992030001 Pengendali Teknik
	4. Elissa Eliza NIP. 1985050500198505002 Kata Tim
	5. Janny Hinda Siregar NIP. 197802020010010010 Anggota
 Bakti Sumantra NIP. 198203040010010008 Anggota	

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (Jika ada)

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (Jika ada).

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023					
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara					
No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Pelaksanaan
1	Membangun aplikasi monev untuk pengumpulan data kinerja dan mengukur capaian kinerja	Melakukan Perencanaan Pembangunan aplikasi Monev	Masih dalam Proses Perencanaan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu	Dalam proses pembahasan
2	Merevisi dokumen Laporan Kinerja	Melakukan Perbaikan dokumen kinerja untuk pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu dan Kepala Bidang	Melakukan rapat dan pertemuan dengan bidang untuk perbaikan kinerja
3	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian target kinerja	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsudan seluruh ASN	Rapat dengan seluruh ASN dalam rangka penjadia informasi dalsm laporan kinerja
4	Membuat Laporan Kinerja secara berkala (per triwulan)	Melakukan rekapitulasi realisasi hasil capaian target kinerja	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu dan Kepala Bidang	Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang
Medan, 2025					
An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
SEKRETARIS,					
					
A. Yazid Matondang, S. Sos					
PEMBINA TINGKAT I					
NIP 196905281998031003					

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024 (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024